

Tata Kelola Kolaboratif Ruang Terbuka Hijau: Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur (*Systematic Literature Review*)

Green Open Space Collaborative Governance: a Systematic Literature Review

Irvan Dian Pratama*), Salahudin, Ali Roziqin

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 65144, Indonesia

*)E-mail korespondensi: irvandianpratama@gmail.com

Diterima: 05 Juli 2021 | Direvisi: 09 November 2021 | Disetujui: 06 Oktober 2021 | Publikasi online: 23 November 2021

ABSTRACT

This research aims to find out the collaborative governance of green open space has been running well but not optimal in its implementation. This study uses systematic literature review as the basic basis to make it easier for researchers /students to be able to review and identify scientific articles systematically with predetermined steps. This study revealed that there were 124 articles selected from 378 articles relevant to the topics discussed. The results of the analysis resulted in 3 different clusters in 38 concepts relevant to the collaborative governance study of green open space. Density visualization mode, there is no dominating author in reviewing author data mapping according to the theme of green open space collaborative governance. This Paper, has limited articles to support literature review, total articles obtained through the scopus database not all of them have related topics that will be used to conduct research, so researchers have difficulty in conducting analysis. Researchers' recommendations on further research need to use analysis by adding several articles that have the same relevance in some sources of scientific articles to make it easier to conduct concrete data analysis.

Kata kunci: Collaborative Governance, Green Space, Optimization, Planning

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola kolaboratif ruang terbuka hijau sudah berjalan dengan baik namun belum optimal dalam pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan sistematis literatur review sebagai landasan dasar untuk mempermudah peneliti/mahasiswa agar dapat mengulas dan mengidentifikasi artikel ilmiah secara sistematis dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Penelitian ini mengungkapkan terdapat 124 artikel yang telah diseleksi dari 378 artikel yang relevan dengan topik yang dibahas. Hasil analisis tersebut menghasilkan 3 cluster yang berbeda dalam 38 konsep yang relevan dengan studi tata kelola kolaboratif ruang terbuka hijau. Dalam penggunaan mode *density visualization* tidak adanya *author* yang mendominasi dalam mengkaji pemetaan data *author* sesuai tema tata kelola kolaboratif ruang terbuka hijau. Semuanya memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam melakukan temuan-temuan yang akan digunakan pada penelitian berikutnya. Penelitian ini mempunyai keterbatasan artikel untuk menunjang *literatur review*. Dari total keseluruhan artikel yang diperoleh melalui database scopus tidak semuanya memiliki keterkaitan topik yang akan di gunakan untuk melakukan penelitian, sehingga peneliti kesulitan dalam melakukan analisis. Rekomendasi peneliti terhadap penelitian selanjutnya perlunya penggunaan analisis dengan menambah beberapa artikel yang memiliki relevansi yang sama di beberapa sumber artikel ilmiah agar mempermudah dalam melakukan analisis data secara konkrit.

Kata kunci: Tata Kelola Kolaboratif, Ruang Terbuka Hijau, Optimalisasi, Perencanaan



Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia and Asosiasi Penerbitan Jurnal Komunikasi Indonesia.

E-ISSN: 2442-4102 | P-ISSN: 1693-3699

PENDAHULUAN

Perkembangan kota di berbagai belahan dunia telah menunjukkan semakin banyaknya pembangunan yang telah memakan lahan kosong di daerah perkotaan. Derasnya arus pembangunan baik secara fisik maupun infrastruktur diikuti dengan munculnya berbagai permasalahan lingkungan. Sejatinya lingkungan perkotaan kebanyakan telah didominasi oleh modernisasi yang dihadapkan berbagai permasalahan akibat dari pembangunan yang tidak terkendali. Salah satu contohnya adalah banyaknya bencana yang sering terjadi seperti banjir, kebakaran, kekeringan, polusi udara, polusi tanah dan lain sebagainya (El Ghorab & Shalaby, 2016). Di sisi lain sebuah dari proses urbanisasi yang saat ini masih terjadi hampir di seluruh kota di dunia semakin menambah masalah perkotaan. Jumlah penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan mengakibatkan semakin banyaknya permasalahan yang di hadapi oleh pemerintah, terutama dari segi administrasi. Kawasan perkotaan yang berkelanjutan ditandai dengan adanya interaksi dan hubungan timbal balik yang seimbang antara manusia dengan alam yang hidup secara berdampingan di dalamnya. Pada kasus lingkungan perkotaan yang memiliki kepadatan tinggi, keseimbangan tersebut kadang sering mengalami gangguan akibat berkurangnya ruang terbuka hijau (Rahmy et al., 2012). Maka dari itu, perlunya mengembalikan kedalam lingkungan perkotaan dengan berbentuk system dinilai penting.

Pentingnya keberadaan sebuah tata ruang terbuka hijau kota, terutama dalam lingkungan tempat tinggal, telah dibuktikan dalam beberapa penelitian (Wu, 2008). Ruang terbuka hijau kota merupakan komponen terpenting yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan manusia, baik berbicara secara ekologis maupun social-psikologis. Namun dengan demikian, untuk saat ini proporsinya semakin berkurang sebagai dampak yang ditimbulkan akibat tingginya kepadatan penduduk yang menyebabkan pertumbuhan populasi manusia yang meningkat setiap tahunnya. Peningkatan dari populasi tersebut secara tidak langsung diikuti oleh peningkatan kebutuhan akan konsumsi energi dan lahan bermukim. Hal ini apabila tidak dapat diimbangi oleh pengendalian guna lahan yang berfungsi membatasi intervensi manusia terhadap lingkungan alam perkotaan. Pembangunan Kawasan perkotaan secara fisik cenderung menghabiskan ruang-ruang terbuka dan menjadikan area terbangun. Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau telah mengakibatkan menurunnya kualitas perkotaan seperti tingginya polusi udara dan meningkatnya kerawanan social (kriminalitas dan krisis social), menurunnya produktivitas masyarakat yang dapat mengakibatkan stress karena terbatasnya ruang public yang tersedia untuk interaksi social (Dwiyanto, 2009).

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, pengertian ruang terbuka hijau ialah area memanjang atau jalur, dan atau mengelompok yang pada penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun buatan manusia, sedangkan menurut Hakim (2003), RTH adalah bagian dari ruang terbuka yang didalamnya berisi tanaman, tumbuhan dan vegetasi agar mendapatkan manfaat dari keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan pada suatu kawasan. Merujuk pada syarat ideal dalam penyediaan lahan RTH yang telah diatur kedalam Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, dijelaskan bahwa proporsi luasan dari RTH suatu perkotaan sebesar 30% dari luas wilayahnya. Proporsi tersebut terbagi kedalam dua bagian yaitu 20% RTH public dan 10% RTH Privat. Sedangkan penggunaan dan manfaat dari RTH dapat ditinjau melalui fungsi intrinsic (fungsi ekologis) dan fungsi ekstrinsik yang mencakup dari fungsi sosial budaya, ekonomi, dan estetika. Ruang terbuka hijau dikelompokkan berdasarkan melalui status kawasan, bukan berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya (Riswandi, 2004). Pada ruang terbuka hijau, penggunaannya kearah bersifat pengisian komponen hijau tanaman atau vegetasi yang alamiah ataupun penggunaan lahan budidaya yang sifatnya seperti lahan sawah, kebun dan lain sebagainya (Suciyani, 2018).

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tisnanta & Ummah (2016), temuan yang dihasilkan telah menjelaskan pada implementasi pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Metro berisi pembentukan jejaring pemerintahan untuk mengoptimalkan peran-peran pemerintah dan *stakeholders* dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Pada penelitian ini juga telah menemukan adanya peran komunitas sebagai *civil society* dirasa memiliki peranan yang cukup penting dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Peran pemerintah sebagai otoritas pemegang regulasi diharapkan agar dapat memberikan dukungan secara menyeluruh dalam mengoptimalkan pengelolaan lingkungan. Pemerintah harus mengambil sikap dalam menciptakan sebuah inovasi yang dapat bermanfaat baik di lingkup pemerintahan maupun masyarakat umum. Dengan mengoptimalkan ruang terbuka hijau sebagai penetralisir antara daerah terbangun dengan daerah terbuka, yang dimana ruang terbuka hijau menggunakan model menjalur dan pada penggunaannya lebih bersifat terbuka, sebagai tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alami maupun yang bersifat sengaja ditanam yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengerahkan

masyarakatnya dalam kegiatan menghijaukan taman kota, sedangkan dalam melakukan proses perencanaan tata ruang, pemerintah memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang melalui media komunikasi yang memiliki jangkauan sesuai dengan tingkat rencana, serta melakukan sosialisasi terkait perencanaan tata ruang, menyelenggarakan kegiatan untuk menerima segala masukan dari masyarakat terhadap perencanaan tata ruang, dan memberikan respon kepada masyarakat atas masukan tentang perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Astriani, 2015).

Adanya hubungan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan sektor swasta merupakan hal yang biasa dalam menunjang keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup. Tidak hanya itu, pelibatan swasta dengan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup hanya sejalan dengan definisi konsep tata pemerintahan yang baik yang telah menjadi tren sebagai *role model* dalam penyelenggaraan pemerintah secara umum. Tata kelola pemerintahan yang baik selalu menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan diperlukan kesimbangan interaksi dan keterlibatan antara pemerintah, dunia usaha (swasta), dan masyarakat sipil. Pemerintah sebagai pemegang otoritas pemegang regulasi tertinggi berhak untuk mengatur yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, untuk penerapannya maka pemerintah perlu melakukan pengawasan. Keberadaan masyarakat akan lebih efektif jika perannya ikut serta dalam mengendalikan pengelolaan lingkungan yang ada. Dukungan masyarakat juga menjadi faktor terpenting atas keberhasilan program Ruang Terbuka Hijau. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat besar dalam melakukan proses pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam melakukan pengawasan sosial, pemberian saran, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan bagi masyarakat lain dan membentuk komunitas hijau, membangun kemitraan, dan menumbuh kembangkan kemampuan serta meja budaya dan kearifan local sesuai kebudayaan setempat. Penambahan Kawasan ruang terbuka hijau dinilai sangat mendesak, baik pemerintah pusat maupun daerah pun mengakui hal tersebut. Namun, bagi beberapa kota juga mengalami kesulitan untuk membangun ruang terbuka hijau, khususnya seperti pembangunan taman-taman baru dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang peran dari taman itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan banyaknya lahan yang kosong bukan milik negara/pemerintah setempat melainkan milik masyarakat setempat. Perlunya keterlibatan sektor swasta dalam melakukan pengembangan sarana dan prasarana akan memberikan keuntungan bagi pemerintah maupun pihak swasta. Bagi sektor swasta keuntungan yang didapat dengan mekanisme seperti ini ialah profit, sedangkan pemerintah ialah mempermudah proses, waktu penyediaan serta meringankan beban dalam anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana perkotaan.

Pada studi komunikasi pembangunan yang berkaitan dengan berbagai isu yang ada di perkotaan. Dalam menghadapi beberapa isu mengenai permasalahan yang terjadi di kota-kota besar dalam penyediaan lahan ruang terbuka hijau diperlukan peran utamanya sebagai bagian dari proses dialogis dalam menyampaikan aspirasi dan ide, informasi serta inovasi oleh beberapa pihak terkait guna menunjang terjadinya sebuah proses perubahan social ke arah yang lebih baik dari pada sebelumnya (Heriyanti, 2015). Perubahan tersebut dampaknya dapat dilihat pada tingkat individu, keluarga kelompok, organisasi, komunitas, dan masyarakat secara luas. (Madsen et al., 2005) berpandangan bahwa agar setiap organisasi mampu membangun kesiapan pemangku kepentingannya untuk siap dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Maka dari itu sebuah proses komunikasi pembangunan memiliki dampak luas apabila dilaksanakan secara sistematis dan sifatnya berkelanjutan. (Harris, 1996) berpendapat bahwa pendekatan komunikasi partisipatif sangat perlu dikembangkan untuk mengembangkan pola berpikir masyarakat di tingkat bawah dengan menggunakan pendidikan non formal. Mengenai dengan pendekatan pembangunan yang telah diimplemetasikan di Indonesia, menurut (Waskita, 2005) memiliki pandangan bahwa pembangunan yang dilakukan hingga saat ini hanya memfokuskan pada hal-hal fisik dan terukur. Alternatif dari model komunikasi yang dapat di usulkan adalah komunikasi dialogis antar actor-aktor yang terlibat dalam proses pembangunan agar terwujudnya ruang terbuka hijau lebih optimal.

Adanya sebuah pembangunan partisipatif dapat memberikan kemudahan ruang bagi masyarakat untuk berdialog dan bermusyawarah dengan pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan, hal ini merupakan sebuah bentuk komunikasi dalam melakukan pembangunan. Menurut Indardi (2016), aspek dari komunikasi dapat dipercaya sebagai salah satu factor penting untuk mencapai sebuah keberhasilan pembangunan, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat serta komunikasi dalam pembangunan dengan mengatasnamakan rakyat atau humanistic. Dengan adanya upaya dalam mewujudkan suatu dialog yang dibangun antara pihak-pihak yang memiliki gagasan pembangunan dengan subjek pembangunan, yaitu rakyat dan pemerintah. Hal ini didukung oleh pernyataan (Hanuranto, 2011) yang

menyatakan bahwa peningkatan akses komunikasi dan informasi dapat memberikan dampak pengaruh secara langsung pada peningkatan pembangunan social ekonomi.

Studi terdahulu juga menjelaskan perencanaan tata kota yang dilakukan di Curitiba (Brazil) dan Montreal (Kanada). Data yang didapat pada artikel ini menggunakan metode wawancara 20 semistruktur dengan melalui informan utama, beberapa dokumen perencanaan pendukung, dan berita-berita pendukung lainnya. Kita dapat mengidentifikasi beberapa peristiwa penting dan bagian yang menjadi penentu utama agar mendapatkan data yang valid diperlukannya sebuah interaksi secara langsung antara actor public dan swasta. Meninjau sejarah dalam melakukan perencanaan dan manajemen perkotaan yang berbeda pada penerapannya, dari kedua studi kasus mengungkapkan kesamaan yang signifikan, terletak pada tingkat interaksi kolaboratif yang memiliki variasi yang dimiliki antara para pemilik pemangku kepentingan sesuai dengan jenis aktor yang terkait, arena, serta fase pada melakukan proses perencanaan. Meskipun berdasarkan dengan jumlah yang terbilang kecil untuk studi kasus dan rencana, temuan pada artikel ini setidaknya telah memaparkan tentang mekanisme, factor, dan proses yang dapat membantuk transisi proses perencanaan kota dari praktik informatif/konsultasi ke dalam model tata Kelola kolaboratif (Follador et al., 2021).

GREEN OPEN SPACE COLLABORATIVE GOVERNANCE

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ketersediaan lahan ruang terbuka (open spaces) pada suatu wilayah perkotaan yang didalamnya terdapat tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemic, introduksi) guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Tipologi RTH berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu RTH yang berbentuk kawasan atau areal dan RTH yang berbentuk jalur atau memanjang. Menurut Grey (1996) bentuk RTH dapat diklasifikasikan sebagai taman kota, lapangan terbuka/bermain, pekarangan, pemakaman dan monument, jalur hijau dan median jalan, sempadan kawasan limitasi dan kawasan khusus. Sedangkan (Lovejoy, 1979) memasukkan kriteria kawasan pertanian sebagai bagian dari kawasan ruang terbuka hijau. Adapun kriteria umum tanaman yang dapat ditanam di wilayah perkotaan yaitu: disenangi dan tidak berbahaya bagi warga kota, mampu tumbuh subur pada lingkungan yang marjinal (tanah tidak subur, udara dan air yang tercemar), tahan terhadap vandalisme, akar dalam dan tidak mudah runtuh, daun tidak mudah gugur, cepat tumbuh, bernilai hias dan arsitektural, dapat menghasilkan O₂ dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan kota, prioritas menggunakan vegetasi endemic/local dan keanekaragaman hayati (Dewiyanti, 2007). Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pengadaan ruang terbuka kota:

1. Manfaat estetis (Nazaruddin, 1994). Diperoleh dari keindahan dan keserasian penataan tanamantanaman ruang terbuka hijau.
2. Manfaat orologis (Nazaruddin, 1994; Phillips, 1993). Dirasakan terutama di daerah/kawasan yang rentan terjadinya erosi, untuk mengurangi tingkat kerusakan struktur tanah, terutama longsor dan menyangga kestabilan tanah.
3. Manfaat Hidrologis (Nazaruddin, 1994; Phillips, 1993). Berkaitan dengan kemampuan akar tanaman untuk menyerap kelebihan air di jika hujan sehingga air tidak mengalir dengan percuma, sebagai daerah persediaan air tanah.
4. Manfaat klimatologis (Nazaruddin, 1994; Phillips, 1993). Keberadaan ruang terbuka hijau mempengaruhi factor-faktor iklim seperti kelembapan, curah hujan, ketinggian tempat, dan membentuk suhu harian yang normal dan dapat menunjang segala aktivitas manusia.

Ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kawasan yang memiliki manfaat kehidupan yang sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan amanah pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang menyebutkan bahwa penataan ruang yang diharapkan dapat mewujudkan ruang kehidupan yang aman, nyaman, produktif, dan sifatnya berkelanjutan. Pengelolaan RTH public harus mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan (Wulandari et al., 2020). Keberlanjutan merupakan kunci keberhasilan dalam pengelolaan RTH public yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi lingkungan. Para ahli mengemukakan bahwa keberadaan RTH memerlukan pengelolaan secara berkelanjutan agar terciptanya kota yang berwawasan lingkungan untuk kepentingan warga kota sekarang maupun mendatang (Budiharjo et al., 1999). Salah satu kebijakan pengembangan pola tata ruang kota dilakukan guna mengoptimalkan dan mempertahankan fungsi dan keberadaan RTH itu sendiri (Pekanbaru, 2013). Salah satu syarat sebagai acuan untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan, pada prinsipnya

menyangkut dimensi ekologi, ekonomi dan sosial serta didukung dengan dimensi kelembagaan. Penentuan status keberlanjutan pengelolaan RTH publik dapat diperoleh menggunakan pendekatan *Multi Dimensional Scalling* (MDS) dengan analisis Rappish. Maka dari itu, diperlukannya evaluasi untuk mengetahui status keberlanjutan RTH publik sebagai cadangan karbon di perkotaan agar terciptanya keseimbangan lingkungan di wilayah kota.

Untuk mengkaji akibat dalam melakukan penataan ruang terbuka hijau di perkotaan serta permasalahan yang dihadapi akibat adanya pembangunan ruang terbuka hijau, penulis dapat menggunakan beberapa literatur penelitian terdahulu tentang tata kelola resiko banjir yang terjadi di Belanda, maka dari itu penelitian mencoba menganalisis ulang bagaimana kondisi eksternal dalam membentuk dinamika kolaborasi lintas sector pada masa lalu hingga masa sekarang untuk melakukan penataan ulang resiko banjir yang terintegrasi di Belanda. Perlunya mengeksplorasi secara sejauh mana kebijakan yang telah dibuat serta pembuatan kerangka hukum, keadaan sosial-ekonomi, realitas politik, hubungan kekuasaan dan situasi konflik telah mempengaruhi upaya kolaborasi antara keselamatan banjir, perencanaan ruang, perlindungan lingkungan dan sektor lainnya. Meskipun pada artikel ini masih adanya interdependensi yang meningkat, hubungan kekuasaan yang ada antara sektor-sektor ditandai dengan dominasi sektor air (Avoyan & Meijerink, 2021).

Konsep dari tata kelola kolaboratif dalam konteks *smart city*, lebih memfokuskan dengan cara mendukung serta merekomendasikan dalam pengelolaan struktur organisasi yang nantinya akan digunakan untuk membangun sebuah jaringan kolaboratif berkelanjutan. Dapat kita ketahui, mengingat dalam mengatur *smart city* ialah tentang dalam mempromosikan hasil dari lingkungan kolaboratif yang efektif di lingkungan pemerintahan dan menyirat dalam pembuatan kebijakan yang bersifat adaptif untuk membangun kolaborasi antara masyarakat, internal dan eksternal. Dengan mempertimbangkan tata kelola yang cerdas sebagai bagian dari hasil jaringan kolaboratif di lingkup pemerintah serta para pemiliki pemangku kepentingan eksternal termasuk warga negara dan system sosial-teknis. Metode yang digunakan melalui pendekatan campuran etnografis dengan menggabungkan metode kualitatif yang mempelajari konsep dari kolaborasi serta keterlibatan actor didalam lingkup pemerintahan. Dibarengi dengan penggunaan metode kuantitatif berlandaskan pada teori grafik untuk memberikan sebuah analisis numerik dalam struktur organisasi. Sementara itu, metode kualitatif digunakan untuk menemukan hasil dari "faktor cerdas" tata kelola organisasi yang dapat memberikan dampak kinerja dari struktur atau konfigurasi, metode kuantitatif bertujuan untuk menemukan "indikator cerdas" dan metrik untuk mengevaluasi faktor-faktor organisasi ini. Dari penggunaan metode campuran tersebut memberikan hasil dalam kerangka kerja rekomendasi analitis dari struktur organisasi yang memiliki relevansi terkait hal ketahanan, fleksibilitas dan efisiensi (Ben Yahia et al., 2021).

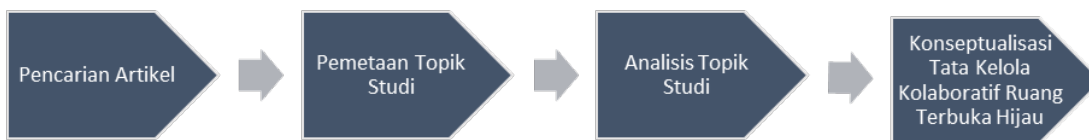
Pada penelitian ini bertujuan dalam mengkaji berbagai artikel ilmiah yang berkaitan dengan membahas *Collaborative Governance* dalam Mengoptimalkan Ruang Terbuka Hijau Taman di Kota Balikpapan yang sebagaimana telah dipublikasikan kedalam jurnal internasional bereputasi. Selain itu juga, artikel *review* dalam kajian ini digiring untuk mengkonseptualisasikan pada kajian dalam pengoptimalisasian ruang terbuka hijau dengan metode *collaborative governance*, yang akan dijelaskan melalui beberapa pertanyaan berikut, yaitu: (1) Bagaimana relasi dan klasterisasi dalam pengoptimalisasian Tata Kelola Kolaboratif Ruang Terbuka Hijau? (2) Apa tema yang lebih dominan dalam kajian pengoptimalisasian Tata Kelola Kolaboratif Ruang Terbuka Hijau? (3) Apa saja topik yang terkait dengan kajian Tata Kelola Kolaboratif Ruang Terbuka Hijau? (4) Jenis pemetaan apa yang digunakan kedalam kajian Tata Kelola Kolaboratif Ruang Terbuka Hijau? (5) Konsep seperti apa yang digunakan dalam kajian Tata Kelola Kolaboratif Ruang Terbuka Hijau? melalui beberapa pertanyaan tersebut akan dijelaskan berdasarkan dengan topik kajian, kerangka kerja, dan beberapa temuan penelitian sebelumnya yang telah terindeks dalam database Scopus.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan aplikasi Vosviewer. Vosviewer adalah perangkat lunak untuk membuat peta berdasarkan dengan data jaringan dan untuk memvisualisasikan dan menjelajahi hasil dari pemetaan ini. Vosviewer dapat digunakan untuk membangun jaringan publikasi ilmiah, jurnal ilmiah, peneliti, organisasi penelitian, negara, kata kunci, atau istilah. Item pada jaringan ini dapat di kaitkan dengan penulisan bersama, cooccurrence, kutipan, penggabungan bibliografi, data dari file web of science, scopus, pubmed, ris, atau crossref JSON dapat digunakan pada penelitian ini (Van Den Berg, 2018). Dari hasil penggunaan Vosviewer akan menghasilkan beberapa variasi sesuai dengan berapa banyaknya data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Akan ada variasi besar dan kecilnya lingkaran serta garis yang menghubungkan. Dalam hal ini berkaitan dengan topik yang lebih dominan atau tidaknya pada data yang akan digunakan.

Penggunaan vosviewer setelah melakukan pengelompokan terdapat 3 tampilan visualisasi yaitu *network*, *overlay*, dan *density visualization* (Maurina & Gessy, 2021).

Beberapa artikel nantinya akan melalui proses review pada penelitian ini akan dijelaskan berdasarkan dengan topik kajian, kerangka kerja, dan beberapa temuan penelitian sebelumnya yang telah terindeks dalam database scopus. Artikel yang akan melewati proses review kedalam penelitian ini akan melalui beberapa tahapan (1) Pencarian Artikel dan (2) pemetaan topik. Adapun artikel yang memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan diperoleh melalui cara berikut. Pertama, mengidentifikasi artikel. Hal ini dilakukan guna untuk memperoleh data di database scopus dengan memasukan “*green open space collaborative governance*” pada kolom pencarian dengan batasan tahun yaitu tahun 2000 hingga tahun 2021.



Grafik 1. Proses Review Artikel

Pencarian tersebut menghasilkan jurnal 378 artikel yang memiliki kaitan dengan topik yang akan dibahas. Tahapan kedua yaitu memverifikasi artikel yang sedang dikumpulkan. Pada saat melakukan verifikasi menghasilkan sebanyak 124 yang telah diseleksi dan dianggap sesuai dengan topik penelitian, kemudian, dari angka tersebut dipersempit lagi dan menyisakan 38 artikel yang benar-benar memiliki relevansi rdengan topik yang akan dibahas dalam peneltian ini.

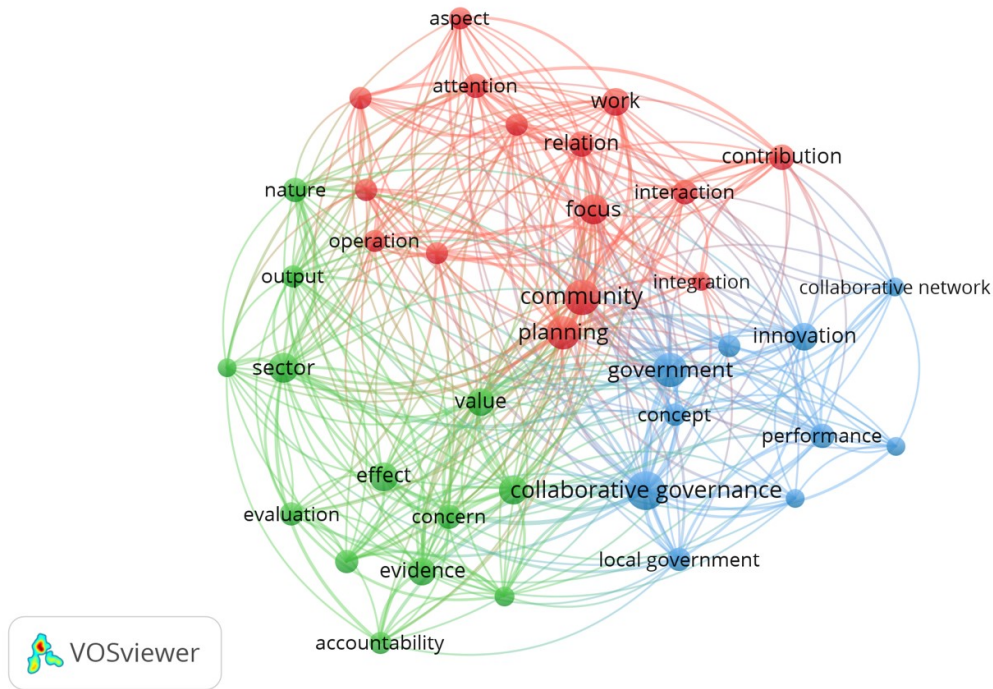
HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan dan Pengelompokan Tema dalam *Collaborative Governance Green Open Space*

VosViewer secara default terdapat jaringan cluster. Sebuah cluster adalah sekelompok node yang saling memiliki keterkaitan erat. Setiap node dalam jaringan ditetapkan ke satu cluster. Jumlah cluster ditentukan oleh parameter resolusi. Semakin tinggi nilai parameter ini, semakin besar juga jumlah clusternya (Nafi'ah et al., 2021). Dalam visualisasi jaringan bibliometric, vosviewer menggunakan warna untuk menunjukkan cluster yang telah ditetapkan node. Teknik clustering yang digunakan oleh vosviewer dibahas oleh (Waltman et al., 2010) Pada teknik tersebut membutuhkan alogaritma untuk memecahkan masalah optimasi. Dalam penggunaan Network Visualization item diwakili oleh labelnya dan secara default juga oleh lingkaran. Ukuran label dan lingkaran pada suatu item akan ditentukan oleh berat item tersebut. Semakin tinggi bobot suatu item ditentukan oleh berat item tersebut. Maka dari itu untuk beberapa item mungkin tidak ditampilkan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya tumpang tindih. Warna dari item tersebut ditentukan oleh cluster tempat item tersebut berada. Garis diantara item mewakili tautan. Secara umum, semakin dekat jarak dua jurnal satu sama lain, maka semakin kuat pula keterkaitannya. Tautan pada kutipan tersebut merupakan yang terkuat antar jurnal yang diwakili oleh garis.

Network Visualization memiliki fungsi untuk memperlihatkan jejaring antar topik yang divisualkan. Pada bagian ini, berdasarkan konsep yang akan dijelaskan ke dalam beberapa visualisasi terkait dengan tema

penelitian ini, dan 38 diantaranya diidentifikasi kedalam 124 artikel. Selanjutnya, dari hasil review mereka dengan menggunakan VOSviewer menjelaskan bahwasannya terdapat 3 Cluster (lihat table 1). Pada gambar 1 telah menunjukkan nama-nama konsep yang diturunkan dari tampilan kepadatan cluster. Selanjutnya kode warna yang digunakan untuk melihat isi dari daftar konsep yang menonjol dari masing-masing cluster. Tujuannya ialah untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin tema yang sering muncul/dibahas pada penelitian yang dilakukan sebelumnya, dan memungkinkannya dapat dipergunakan dalam penelitian selanjutnya. Bisa dilihat pada gambar 1, terlihat kepadatan di setiap cluster yang telah dibedakan oleh warna-warna yang berbeda dari setiap cluster. Guna mempermudah peneliti selanjutnya untuk menentukan cluster yang telah dikelompokkan menjadi topik pembahasan yang memiliki keterkaitan satu sama lain.



Gambar 1. Hubungan tema dalam Ruang Terbuka Hijau Kolaboratif

Identifikasi dalam bentuk pemetaan pada gambar 1 dapat membantu peneliti selanjutnya yang baru melakukan penelitiannya dari awal. Ketika mereka telah menemukan topik yang menarik dibidang tertentu, yang mereka ingin tahu, mereka dapat membaca artikel-artikel yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas melalui bantuan dengan adanya studi ini. Pada cluster 1, konsep terkait adalah *planning, community, focus, relation, interaction, contribution, integration, aspect, attention, work*, sedangkan pada cluster 2 membahas pada *collaborative governance, government, collaborative network, innovation, performance, local government, concept*. Hal terakhir pada cluster 3 lebih membahas *nature, ouput, sector, evaluation, concern, value, effect, dan accountability, evidence*.

Tabel 1 Tema berkerumun di Ruang Terbuka Hijau Kolaboratif

Cluster	Concept Name	Total
Cluster 1	planning, community, focus, relation, interaction, contribution, integration, aspect, attention, work.	15
Cluster 2	collaborative governance, government, collaborative network, innovation, performance, local government, concept	13
Cluster 3	nature, ouput, sector, evaluation, concern, value, effect, accountability, evidence.	10

Untuk cluster 1 berakitan dengan focus pemerintah dengan membuat kerja sama dengan beberapa pihak terkait dinas dalam melakukan optimalisasi ruang terbuka hijau di kota, maka artikel yang relevan itu seperti yang di tulis oleh (Wolf et al., 2021) dengan judul artikel “A Collaborative Methodology for Local Strategic Planning: Insights from Four Plans in Portugal” dimana praktisi dalam melakukan perencanaan telah ditentang oleh tuntutan melalui proses yang lebih terbuka, efektif, dan transparan. Akan tetapi penggunaan model kolaboratif yang telah mencoba untuk mewujudkan tujuan terkadang membuahkan hasil yang tidak memuaskan atau kurang dalam pengimplementasiannya. Disini pemerintah harus melakukan berbagai upaya dengan membentuk koordinasi secara vertical kepada beberapa pihak yang memiliki peran dalam menunjang perancangan pembangunan, pada proses pencapaiannya memiliki tujuan yang berbeda dan terkadang sering menimbulkan pertentangan. Pada prosesnya perencanaan pembangunan di setiap kota, dapat dipastikan setiap actor-aktor yang memiliki perannya masing-masing dalam menunjang pembangunan tata ruang terbuka hijau memiliki kepentingan dan maksud tujuannya. Pada artikel ini membahas dengan menggunakan pendekatan inovatif dan menerapkan beberapa rencana yang telah didiskusikan sebagai bentuk kerja sama dalam mengoptimalkan ruang terbuka hijau. Diperlukannya upaya pemerintah setempat untuk membangun komunikasi dan menjalin kerja sama kepada pihak-pihak terkait, serta pemerintah kota harus melibatkan masyarakat untuk menampung aspirasi serta masukan dan saran guna tercapainya tujuan bersama. Hal itu dilakukan guna pada proses pembangunannya tidak timbul pertentangan yang menyebabkan penambahan tersebut akan tertunda nantinya.

Selain itu juga, artikel yang terkait pada cluster ini juga telah dijelaskan oleh penulis (Follador et al., 2021) pada artikel terpublish dengan judul “Collaborative Governance in Urban Planning: Patterns of Interaction in Curitiba and Montreal” pada artikel ini menjelaskan tentang tata Kelola kolaboratif ialah sebuah gagasan bahwasannya pemerintah, masyarakat sipil, dan actor swasta. Terlepas dari adanya sebuah perbedaan sejarah dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan kota, yang dimana dari kedua studi kasus tersebut mengungkapkan adanya kesamaan yang signifikan, yaitu tingkatinteraksi kolaboratif antar pemangku kepentingan yang bervariasi menurut jenis pelaku yang terlibat didalamnya, arena, serta fase pada proses perencanaannya. Keberhasilan sebuah reformasi demokrasi kebanyakan dirusak oleh pemeliharaan lembaga informal, sedangkan kelambagaan konsultasi menjelaskan kurangnya sebuah partisipasi dikalangan masyarakat. Meskipun berdasarkan sejumlah kecil kasus dan rencana, temuan kami mengungkapkan mekanisme, faktor, dan proses yang dapat membantu transisi proses perencanaan kota dari praktik informatif / konsultatif ke model tata kelola kolaboratif.

Pada cluster 2 yang paling dominan yaitu Collaborative Governance, memiliki keterkaitan dengan artikel yang di tulis oleh (Lindgren et al., 2021) dengan judul artikel “Process Makes Perfect: Perceptions of Effectiveness in Collaborative Environmental Governance” adanya sebuah bentuk kerja sama untuk mengevaluasi efektivitas pengaturan dalam tata Kelola lingkungan dengan metode kolaboratif. Hal yang menjadi perhatiannya utama adalah mendeskripsikan tidak hanya pada proses dan actor yang menjadi bagian dari system model seperti ini, akan tetapi berdampak pada proses kondisi ekologi dan sosialnya. Pada artikel tersebut juga menjelaskan bagaimana kriteria proses dan hasil yang digunakan oleh sponsor, praktisi industri, dan peserta pengaturan tata kelola lingkungan kolaboratif di sektor kehutanan Kanada untuk memastikan efektivitas pada pengimplementasiannya. Secara eksplisit mencari bukti dari sponsor dan praktisi industri tentang komite penasihat hutan yang menggambarkan dirinya sendiri, mengantisipasi bahwa sponsor atau praktisi mungkin lebih menekankan daripada peserta pada kriteria hasil daripada kriteria proses.

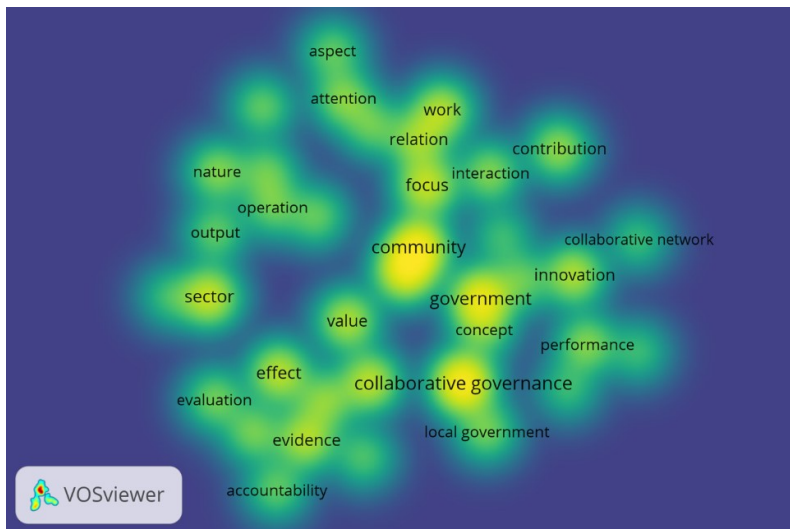
Adapun artikel lain yang membahas topik pada cluster 2 diteliti oleh (McAfee et al., 2021) dengan judul artikel yang dibahas “Environmental solutions fast-tracked: Reversing public scepticism to public engagement”. Dalam artikel tersebut membahas terkait tujuan yang dapat dicapai untuk mengelola Kesehatan lingkungan mungkin lebih efektif jika tujuan dari lingkungan tersebut akan selaras dengan kepentingan sosial yaitu kepada kepentingan masyarakat. Dengan itu melibatkan para pemangku kepentingan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat

memungkinkan agar memperoleh pengetahuan, harapan, dan perhatian sosial dalam menginformasikan sebuah perencanaan. Inklusi ini mengurangi risiko reaksi masyarakat atau politik terhadap keputusan lingkungan dan membangun dukungan untuk solusinya. Dalam artikel tersebut juga menjelaskan tentang keterlibatan publik dengan pengelolaan dan sejarah sosio-ekologis, dan sebuah proses sosial yang mengembalikan sketisisme publik. Selain itu juga, dapat membentuk stigma yang dibangun oleh pemerintah selama ini bahwasannya pemerintah selalu mendominasi dalam melakukan pembangunan, saat ini upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah bagaimana cara mengajak atau mengayomi masyarakat dalam melakukan perencanaan pembangunan.

Cluster terakhir yaitu cluster 3, memiliki topik yang dominan yaitu dibidang sector. Dalam hal ini telah di bahas pada artikel yang telah di teliti oleh (Avoyan & Meijerink, 2021) yang berjudul “Cross-sector collaboration within Dutch flood risk governance: historical analysis of external triggers”. Pada artikel ini lebih membahas diperlukan adanya kolaborasi antar lintas sector dalam menangani tata kelola resiko banjir di Belanda, dengan menganalisis bagaimana kondisi eksternal dalam membentuk dinamika kolaborasi lintas sektor dimasa lalu dengan masa yang sekarang untuk pengelolaan resiko banjir yang terintegrasi di Belanda. Pada temuan artikel yang dibahas terdapat sejauh mana kebijakan yang dibuat serta kerangka hukum, keadaan sosio-ekonomi, realitas politik, hubungan kekuasaan dan situasi konflik yang sebagaimana telah mempengaruhi upaya kolaborasi antara keamanan banjir, perencanaan tata ruang, perlindungan lingkungan dan sector yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Meskipun saling ketergantungan yang tumbuh, hubungan kekuasaan yang ada antar sector ini dicirikan oleh dominasi sector air. Oleh karena itu, maka diperlukan kolaborasi lintas sector yang dapat berkembang selama tidak membahayakan pada keselamatan banjir.

Tema Dominan dalam Studi Collaborative Governance Green Open Space

Pada bagian ini, dalam mengidentifikasi tema dominan yang akan dibahas melalui penelitian terdahulu berkaitan dengan tema Kolaboratif Pemerintah ruang terbuka hijau, ditemukan topik kata yang lebih dominan dengan cara melihat kepadatan warna. Menggunakan Konsep dari *Density Visualization* akan dijelaskan kedalam beberapa visualisasi terkait dengan tema penelitian ini, dan 38 diantaranya diidentifikasi kedalam 124 artikel. Dengan penggunaan melalui *Density Visualization*, disini mempermudah penulis dalam menemukan tema yang dominan dengan cara melihat warna yang dibold secara jelas terletak pada tema dominan. Kemudian dengan bantuan *Density Visualization*, akan lebih mudah untuk mengidentifikasi topik yang relevan untuk di bahas pada penelitian yang dilakukan saat ini, berbeda dengan penggunaan *Network Visualization* yang terkadang memiliki kedudukan yang sama dalam topik pembahasan, dan pada penggunaan *network visualization* mempersulit penulis dalam mengidentifikasi temuan topik. Lihat gambar 2, terlihat kepadatan warna pada topik pembahasn yang telah digabung dari setiap cluster.

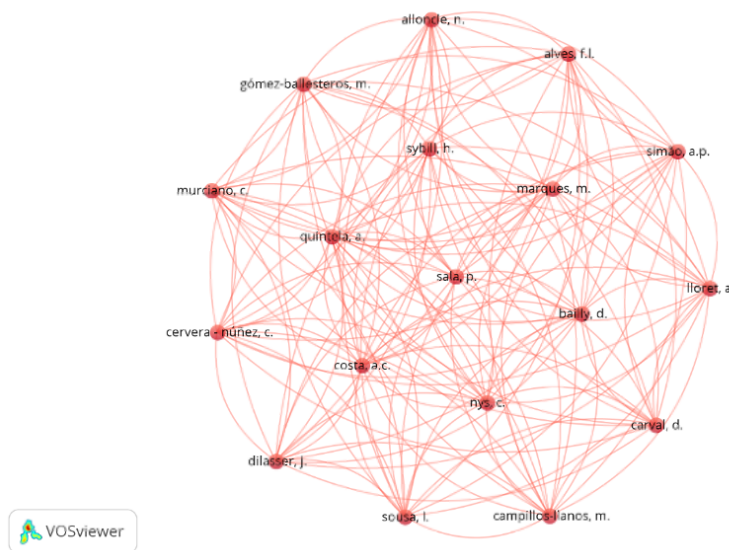


Gambar 2. Konsep Dominan Dilihat dari *Density Visualization*

Dalam Gambar 2 terlihat jelas konsep yang lebih dominan yang muncul dari hasil density visualization, ditandai dengan ketebalan warna yang sangat menonjol. Dimana telah menunjukkan bahwa kata/topik pembahasan muncul dengan warna yang tebal, hasil tersebut merupakan tema-tema yang dominan yang dibahas oleh penelitian terdahulu dan berkaitan dengan tema Kolaboratif Pemerintah ruang terbuka hijau. Terdapat konsep (1) *Community* (2) *Government* (3) *Collaborative Governance*. Konsep dari *Collaborative Governance* memang sangat jelas mendominasi karena lebih sering digunakan oleh peneliti dalam artikel yang mereka publish dan sesuai dengan tema yang akan dibahas pada penelitian selanjutnya. Untung konsep yang lain, merupakan konsep pendukung atau konsep yang memiliki tujuan pembahasan yang sejalan sehingga mendukung konsep dominan yang ada, begitu juga dengan sebaliknya.

Author Dominan Dalam Studi *Collaborative Governance Green Open Space*

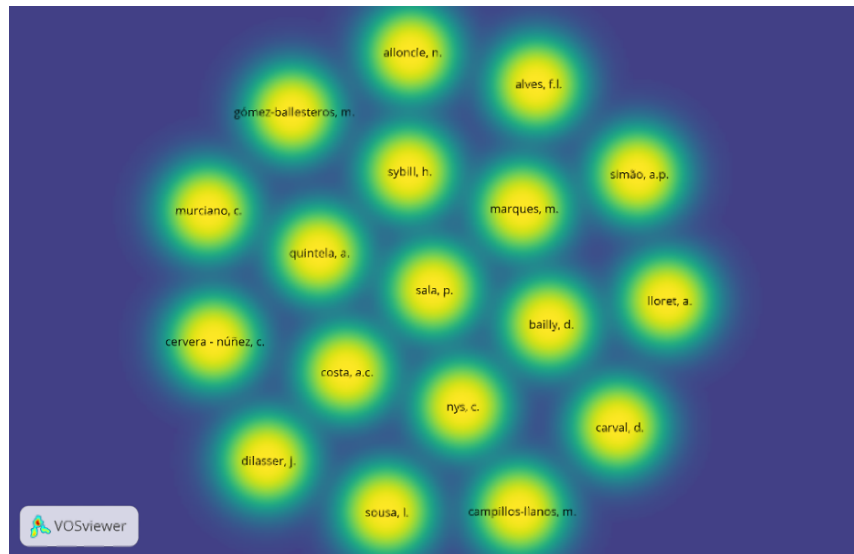
Pada bagian ini, penggunaan *Author Network Visualization* mempermudah peneliti melalui temuan-temuan artikel yang dimana para penulis/peneliti artikel tersebut memiliki keterkaitan dalam pembuatan artikel. Bagian ini juga para penulis memiliki ide pemikiran yang sama dengan para penulis/peneliti lainnya. Secara tidak langsung dari penulis yang terjaring kedalam *author network visualization* memiliki topik pembahasan yang sejalan tema Tata Kelola Kolaboratif Ruang Terbuka Hijau. Bisa dilihat dari gambar 3 yang dimana telah menunjukkan sekumpulan topik pembahasan melalui berkumpulnya beberapa penulis yang melakukan riset penelitian dalam artikelnya.



Gambar 3. Pemetaan data *Author* dengan model *Network Visualization*

Pada pemetaan data *author* melalui *author network visualization*, terlihat pada gambar 3 yang dimana beberapa *author* tidak diklasifikasikan ke dalam beberapa cluster yang dihasilkan melalui artikel riset penelitian. Terlihat dari warna yang dihasilkan, yaitu hanya memiliki satu warna saja dalam pemetaan data cluster. Untuk tema Tata Kelola Kolaboratif hanya memiliki satu cluster saja dalam pembahasan menggunakan *Network Visualization*, yang dimana seluruh *author* tidak memiliki kedudukan berbeda dalam melakukan penelitian pada artikel mereka. Dalam hal ini artinya mereka memiliki kedudukan yang sepadan dalam membuat artikel untuk dikaji kedalam penelitian berikutnya. Akan tetapi *author* (Sala et al., 2021) memiliki terletak berada pada posisi titik pusat, yang menandakan (Sala et al., 2021) memiliki keterkaitan topik pembahasan dengan para *author* lainnya.

Untuk menentukan *author* dominan, peneliti dapat menggunakan *author density visualization*. Hal ini dapat mempermudah peneliti selanjutnya untuk mendapatkan *author* yang dominan untuk melakukan kajian riset berikutnya. Dengan melihat kepadatan warna yang dihasilkan melalui *author density*, peneliti dapat menentukan tema tata kelola kolaboratif dengan menggunakan *author* yang lebih dominan didalam artikel yang dikaji. Bisa dilihat melalui gambar 4 pada pemetaan data *author* dengan mode *Density Visualization*.



Gambar 4. Pemetaan data Author dengan mode *Density Visualization*.

Berdasarkan gambar 4 author sala,p. menduduki posisi titik utama dalam menghasilkan riset kajian terkait tema pembahasan tata kelola kolboratif ruang terbuka hijau. Akan tetapi dalam pemetaan data author dengan penggunaan mode *density visualization* tidak adanya author yang mendominasi dalam mengkaji dengan sesuai tema tata kelola kolaboratif ruang terbuka hijau. Semuanya memiliki kedudukan yang sama dalam mengkaji artikel ilmiah. Karena penulis-penulis yang terdapat pada gambar di atas sama-sama memiliki kedudukan yang penting dalam melakukan temuan-temuan yang akan digunakan pada penelitian berikutnya. Serta relevansi terhadap studi tata kelola kolaboratif ruang terbuka hijau memiliki keterkaitan satu sama lain. Selanjutnya, bisa dilihat pada pengelompokan author dalam bidang studi ruang terbuka hijau.

Tabel 2 Pengelompokan Author Dalam Studi *Collaborative Governance Open Green Space*

Cluster	Nama Author	Total
Cluster 1	alloncle, n. alves, f.l. baily, d. campillos-llanos, m. carval, d. cervera-nunez, c. costa, a.c. dilasser, j. gomez-ballesteros, m. lloret, a. marques, m. murciano, c. nys, c. quintela, a. sala, p. simao, a.p. sousa, l. sybill, h.	18

Dalam pemetaan Author ini, hanya terdiri dari 1 Cluster yang tidak di dominasi oleh penulis dalam melakukan mengkaji artikel terkait dengan tema pembahasan tata kelola kolaboratif ruang terbuka hijau. Akan tetapi dalam pemetaan tabel diatas, beberapa author telah berkontribusi dalam melakukan penelitian terkait tema tata kelola kolaboratif ruang terbuka hijau. Peneliti mencoba menelaah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan topik atau tema dengan Author lainnya. Secara menyeluruh dari 1 cluster, author yang paling dominan pada penelitiannya adalah tidak ada. Karena 18 author mempunyai kedudukan yang sama/dominan dalam melakukan penulisan artikel dengan membahas tema *Collaborative Governance Green Open Space*. Maka dari itu, peneliti akan menelaah lebih dalam lagi mengenai tema tata kolaboratif ruang terbuka hijau.

Pada cluster yang hanya terdiri dari satu, studi yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berjudul “Land-use changes in the canary archipelago using the CORINE data: A retrospective analysis” (Gómez et al., 2020) menjelaskan bahwa hubungan antara tata kelola territorial dan menerapkan upaya dalam melakukan pembangunan yang bersifat berkelanjutan terbukti sangat penting. Melihat dari alat ekspolarasi contohnya seperti system informasi geografis (SIG), dinilai dapat memungkinkan masyarakat untuk memahami pola, dinamika, dan parameter dari setiap perubahan yang ada pada penggunaan lahan selama bertahun-tahun. Dari hasil studi tersebut dapat digunakan pada desain strategi tata kelola territorial yang sistemnya berkelanjutan. Secara kontekstual telah dilakukannya sebuah studi yang berdasarkan pada perubahan penggunaan lahan

yang terjadi dikawasan perkotaan Bahkan dapat memungkinkan jika sebagian besar dari penggunaan lahan telah stabil selama masa periode analisis, studi ini mampu melakukan penyelidikan yang terjadi. Dari hasil penelitian tersebut telah menunjukkan penurunan lahan pada sector pertanian. Sebaliknya, apabila dapat memungkinkan untuk memverifikasi pada peningkatan di daerah semi-alami dan aglomerasi perkotaan. Selain itu penulis dapat menilai bahwa setiap perubahan penggunaan lahan di daerah ultra-pinggiran ini untuk mengungkapkan beberapa hambatan dan peluang untuk terciptanya sebuah pembangunan yang sifatnya berkelanjutan.

Studi penelitian yang dilakukan author pada cluster ini juga melibatkan author m. carval yang berjudul “National Level Preparedness for Implementing the Health-related Sustainable Development Goals (SDGs) in Seven South Asian Countries: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Pakistan, Nepal and Sri Lanka” yang menjelaskan terkait ekplorasi pengaturan kelembagaan nasional dengan tujuan terciptanya sebuah pembangunan berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan author tersebut telah menggambarkan peran dari berbagai para pemangku kepentingan dalam mengimplemnetasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengidentifikasi dimana terjadinya sebuah kesenjangan yang dapat memungkinkan terjadi pada tingkat nasional dan regional. Dari penelitian tersebut menganalisis inisiatif yang diambil oleh tujuh negara asia selatan sejauh mana dalam mengimplemntasikan pembangunan berkelanjutan. Analisis dari penelitian ini didasarkan pada temuan proyek penelitian melalui “lembaga penelitian dan pembangunan berkelanjutan” yang telah dilakukan ditujuh negara di asia selatan yang dipimpin oleh Sustainable Development Policy Institute (SDPI), Pakistan dan studi yang dilakukan oleh tim peneliti di negara afghanistan, bangladesh, Bhutan, india, Nepal, Pakistan, dan sri lanka. Sejauh mana Sustainable Development Goals (SDGs) telah dilokalkan dan diimplementasikan bervariasi di negara-negara Asia Selatan. Sementara, Bangladesh dan Bhutan telah memprakarsai adopsi Sustainable Development Goals (SDGs) dengan rencana dan program pembangunan, yang lain telah membentuk struktur kelembagaan dan saluran koordinasi tingkat nasional. Kekhawatiran menyeluruh adalah kurangnya kepemilikan Sustainable Development Goals (SDGs) oleh pemerintah daerah untuk implementasi dan koordinasi. Tingkat keterlibatan pemangku kepentingan non-negara seperti organisasi non-pemerintah (LSM), masyarakat sipil, think tank, lembaga penelitian, akademisi, dan media, bagaimanapun, bervariasi di seluruh negara. Keterlibatan ini berkisar dari peningkatan kesadaran, hingga konsultasi, keanggotaan dalam komite, dan perencanaan dan pembuatan kebijakan.

Selanjutnya, pada jurnal lain yang berjudul “Expansion of protected area networks integrating ecosystem service and social-ecological coordination” yang dilakukan oleh author sala,p. pada jurnal ini menjelaskan perluasan sebuah jaringan kawasan lindung sangat diperlukan bagi negara dan wilayah diseluruh dunia untuk melestarikan keanekaragaman hayati, melindungi ekosistem alan yang dimiliki dan mencapai dengan pembangunan berkelanjutan. Namun pada prosesnya, adanya tantangan yang dihadapi dalam memperluas jaringan kawasan lindung secara efektif, terutama dalam menangani kawasan konservasi prioritas dan menyeimbangkan pembangunan social dan konservasi ekologis. Masalah-masalah ini telah dibahas dalam “ecological conservation redline”, sebuah program yang diluncurkan di China untuk membangun jaringan konservasi skala besar dan komprehensif. Dalam studi ini juga, telah menyajikan sebuah kerangka kerja berdasarkan *ecological conservation redline* untuk memandu perluasan jaringan kawasan lindung, dengan mengidentifikasi secara mendalam area yang memerlukan konservasi prioritas dan menggabungkan konservasi ekologis dan pembangunan social yang telah terkoordinasi. Kerangka kerja tersebut terdiri dari tiga langkah: (1) merancang jaringan dengan mengidentifikasi titik-titik fungsi ekologis, kerentanan ekologis, dan keanekaragaman hayati, (2) mengubah jaringan dari teori menjadi praktik melalui verifikasi batas, dan (3) menetapkan kebijakan pengelolaan dengan pertimbangan dari mata pencaharian masyarakat lokal. Kerangka kerja ini diterapkan di Provinsi Sichuan, Cina untuk menunjukkan keefektifannya dalam memperluas jaringan PA dan meningkatkan upaya konservasi. Kerangka kerja ini memberikan referensi penting untuk perencanaan jaringan PA dan berkontribusi pada ekspektasi global akan pengelolaan lingkungan yang efektif.

Berdasarkan data yang diperoleh dari review paper dengan Vosviewer, tata kelola pembangunan kolaboratif ruang terbuka hijau juga berkaitan dengan komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan menekankan pada kolaborasi dan kerjasama stakeholders. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa kerjasama stakeholders dilakukan melalui keterlibatan atau partisipasi masyarakat (community) dan mengedepankan konsep collaborative governance. Dengan adanya komunikasi yang dibangun dari pemerintah kepada masyarakat dan beberapa pihak yang terlibat dalam perubahan dapat menerima perubahan dan memahami bahwa perubahan memang sangat diperlukan untuk kebaikan organisasi agar dapat menunjang sebuah tata kelola ruang terbuka hijau agar lebih maksimal dalam penggunaannya (Aruman

et al., 2017). Langkah awal yang digunakan pada proses pelaksanaan inisiatif perubahan ialah terciptanya sebuah kesiapan untuk menghadapi perubahan (Self & Schraeder, 2009).

Dengan membangun komunikasi yang baik selama menghadapi perubahan dapat melahirkan sebuah pemahaman, menyesuaikan antara tujuan organisasi dan individu yang berada dalam organisasi tersebut, serta mempermudah jalannya sebuah interaksi diantara yang terlibat dalam perubahan, menjadi arahan dan memberikan motivasi bagi masyarakat (community). Sangat dianjurkan apabila melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan kebijakan yang telah diakui oleh para ahli, karena adanya sebuah keyakinan bahwasannya partisipasi masyarakat dalam perdebatan public dapat meningkatkan kualitas dalam hal pengambilan kebijakan (Bichard, 1999). Masyarakat (*community*) harus dilibatkan dalam komunikasi dua arah dengan pemerintah dan beberapa actor yang terlibat sehingga partisipasi masyarakat meningkat dan dapat menyuarakan ide dan gagasan.

KESIMPULAN

Review artikel yang bertemakan tata kelola kolaboratif ruang terbuka hijau yang mencakup 3 cluster dan memiliki 15 topik utama, serta telah mengulas beberapa artikel yang dari 124 yang diambil 378 artikel dan diperkecil lagi menjadi 38 artikel yang diperoleh dari data scopus dengan topik yang akan dibahas. Dari hasil tersebut diperoleh dari database scopus lalu dianalisis melalui aplikasi Vosviewer. Dari hasil review yang diperoleh melalui Vosviewer menunjukkan bahwa terdapat beberapa konsep yang dominan pada cluster yang ada dengan studi tata kelola kolaboratif ruang terbuka hijau. Pada cluster 1 berkaitan dengan perencanaan, komunitas, focus, hubungan, interaksi, kontribusi, integrasi, aspek, perhatian, kerja sama dengan membuat kerja sama, konsep trakit pada cluster 2 membahas tentang pemerintahan kolaboratif, pemerintah, jaringan kolaboratif, inovasi, peforma, pemerintahan local, dan konsep, dan terakhir untuk cluster 3 lebih membahas alam, keluaran, sektor, evaluasi, perhatian, nilai, efek, akuntabilitas, bukti. Hal ini juga sesuai dengan apa yang telah diteliti sebelumnya oleh peneliti sehingga dapat membantu peneliti dalam mencari informasi tentang tema yang akan dikaji. Dalam tulisan ini juga, ada beberapa topik yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan tata kelola ruang terbuka hijau, yaitu perencanaan, komunitas, pemerintahan kolaboratif, pemerintah, inovasi, aspek, perhatian, dan interaksi. Dilihat dari penelitian terdahulu, maka kunci utama dalam tata kelola ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan adalah mampu memanfaatkan dan mengelola ruang-ruang kosong di perkotaan, apalagi jika dilakukan bersama dengan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan beberapa sector untuk menunjang pembangunan kawasan ruang terbuka hijau. Peran pemerintah juga harus mampu membangun komunikasi antar warga kota maupun sector yang mendukung pembangunan kawasan ruang terbuka hijau. Pada penelitian ini, mempunyai keterbatasan artikel untuk menunjang literatur review. Kebanyakan dari total keseluruhan artikel yang diperoleh melalui database scopus tidak semuanya memiliki keterkaitan topik yang akan di gunakan untuk melakukan penelitian. Sehingga menyulitkan bagi peneliti untuk menambah wawasan serta literatur review sebagai kajian yang terstruktur. Pada pengkajiannya hanya menggunakan dua aplikasi saja yaitu Vosviewer dan Mendeley, sehingga peneliti tidak mendapatkan data secara valid dari berbagai artikel yang berfungsi sebagai bahan referensi untuk mendapatkan cakupan yang begitu luas. Maka dari itu, penelitian ini tidak memiliki data yang dapat dijadikan perbandingan. Rekomendasi peneliti terhadap penelitian selanjutnya perlunya penggunaan pendekatan analisis komparatif yang melibatkan database scopus dan web of sciences.

DAFTAR PUSTAKA

- Aruman, A. E., Sumardjo, S., Panjaitan, N. K., & Sadono, D. (2017). Model Komunikasi untuk Membangun Kesiapan Perubahan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 15(1), 43–55. <https://doi.org/10.46937/15201722768>
- Astriani, N. (2015). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Di Kota Bandung. *Veritas et Justitia*, 1(2), 274–297. <https://doi.org/10.25123/vej.1689>
- Avoyan, E., & Meijerink, S. (2021). Cross-sector collaboration within Dutch flood risk governance: historical analysis of external triggers. *International Journal of Water Resources Development*, 37(1), 24–47. <https://doi.org/10.1080/07900627.2019.1707070>
- Ben Yahia, N., Eljaoued, W., Bellamine Ben Saoud, N., & Colomo-Palacios, R. (2021). Towards sustainable collaborative networks for smart cities co-governance. *International Journal of Information Management*, 56. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.11.005>

- Bichard, M. (1999). *Modernizing the Policy Process* (London, Public Management and Policy Association).
- Budiharjo, E., Sujarto, D., & Salim, E. (1999). *Kota berkelanjutan / Eko Budihardjo, Djoko Sujarto ; kata pengantar, Emil Salim* (pp. 239–242). Bandung : Alumni, 1999.
- Dewiyanti, D. (2007). RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG Suatu Tinjauan Awal Taman Kota Terhadap Konsep Kota Layak Anak. *Majalah Ilmiah Unikom*, 7(1), 13–26.
- Dwiyanto, A. (2009). KUANTITAS DAN KUALITAS RUANG TERBUKA HIJAU DI PERMUKIMAN PERKOTAAN. *UNDIP E-JOURNAL SYSTEM PORTAL*, 30, 88–92. <http://eprints.undip.ac.id/20182/>
- El Ghorab, H. K., & Shalaby, H. A. (2016). Eco and Green cities as new approaches for planning and developing cities in Egy pt. *Alexandria Engineering Journal*, 55(1), 495–503. <https://doi.org/10.1016/j.aej.2015.12.018>
- Follador, D., Tremblay-Racicot, F., Duarte, F., & Carrier, M. (2021). Collaborative Governance in Urban Planning: Patterns of Interaction in Curitiba and Montreal. *Journal of Urban Planning and Development*, 147(1). [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)UP.1943-5444.0000642](https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000642)
- Gómez, J. M. N., Lousada, S., Velarde, J. G., Castanho, R. A., & Loures, L. (2020). Land-use changes in the canary archipelago using the CORINE data: A retrospective analysis. *Land*, 9(7). <https://doi.org/10.3390/land9070232>
- Hakim, R. (2003). *Arsitektur lansekap: manusia, alam dan lingkungan*. Penerbit Universitas Trisakti.
- Hanuranto, A. T. (2011). Peningkatan akses dan kompetensi teleinformatika (ICT) bagi petani dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian nasional. *Prosiding*, 1–5.
- Harris, E. M. (1996). The Role of Participatory Development Communication as a Tool of Grassroots Nonformal Education: Workshop Report. *Participatory Development Communication: A West African Agenda*. The International Development Research Centre: Science for Humanity.
- Heriyanti. (2015). Komunikasi Pembangunan Memberikan Peranan Penting Bagi Pemberdayaan Masyarakat pesisir (Studi Kasus Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu , Jakarta). *PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI_U) Kajian Multi Disiplin Ilmu Untuk Mewujudkan Poros Maritim Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat*, 2(1), 978–979. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/3309>
- Indardi, I. (2016). Pengembangan Model Komunikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani (Studi Kasus pada Kelompok Tani Jamur Merang Lestari Makmur di Desa Argorejo, Sedayu, Bantul). *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 2(1), 75–86.
- Lindgren, A. Y., Reed, M. G., & Robson, J. P. (2021). Process Makes Perfect: Perceptions of Effectiveness in Collaborative Environmental Governance. *Environmental Management*, 67(2), 228–241. <https://doi.org/10.1007/s00267-020-01402-5>
- Lovejoy, D. (1979). *Landuse and Landscape Planning (Second Edition)* (Second Edi).
- Madsen, S. R., John, C. R., & Miller, D. (2005). Work-family conflict and health: A study of workplace, psychological, and behavioral correlates. *Journal of Behavioral and Applied Management*, 6(3), 225–247.
- Maurina, N., & Gessy, M. (2021). *Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pasca Era New Normal di Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Infrastructure Development Planning After New Normal Era in Kotawaringin Timur , Central Kalimantan Province*. 28–45.
- McAfee, D., Reinhold, S.-L., Alleway, H. K., & Connell, S. D. (2021). Environmental solutions fast-tracked: Reversing public scepticism to public engagement. *Biological Conservation*, 253. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108899>
- Nafi'ah, B. A., Roziqin, A., Suhermanto, D. F., & Fajrina, A. N. (2021). The Policy Studies journal: A Bibliometric and mapping study from 2015 to 2020. *Library Philosophy and Practice*, 2021, 1–18.
- Nazaruddin. (1994). *Penghijauan Kota* (1st ed., pp. 101–104). Penebar Swadaya.
- Pekanbaru, B. P. P. D. (2013). *RTH Kota Pekanbaru: Seminar Lingkungan*. Pekanbaru.

- Phillips, L. E. (1993). *Urban trees: a guide for selection, maintenance, and master planning* (Issue Sirsi) i9780070498358).
- Rahmy, W. A., Faisal, B., & Soeriaatmadja, A. R. (2012). Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota pada Kawasan. *Lingkungan Binaan Indonesia*, 1(1), 27–38.
- Riswandi. (2004). *Ruang Terbuka Hijau*. <http://www.damandiri.or.id>
- Sala, P., Vukomanovic, J., Sills, E. O., & Sanchez, G. (2021). Cultural ecosystem services caught in a ‘coastal squeeze’ between sea level rise and urban expansion. *Global Environmental Change*, 66. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102209>
- Self, D. R., & Schraeder, M. (2009). Enhancing the success of organizational change: Matching readiness strategies with sources of resistance. *Leadership & Organization Development Journal*.
- Suciyani, W. O. (2018). Analisis Potensi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Kampus Di Politeknik Negeri Bandung. *Jurnal Planologi*, 15(1), 17. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v15i1.2742>
- Tisnanta, H., & Ummah, R. (2016). Ruang Terbuka Hijau Kota Metro Lampung dan Pandangan Aspek Keagamaan. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 31(1), 55–80. <https://www.neliti.com/publications/146397/ruang-terbuka-hijau-kota-metro-lampung-dan-pandangan-aspek-keagamaan>
- Van Den Berg, C. (2018). 21 st Century Learning: Changes to knowledge acquisition in a digital world. *Proceedings of the International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning, ICICKM, 2018-Novem*(January), 330–338.
- Waltman, L., Van Eck, N. J., & Noyons, E. C. M. (2010). A unified approach to mapping and clustering of bibliometric networks. *Journal of Informetrics*, 4(4), 629–635.
- Waskita, D. (2005). Komunikasi Pembangunan untuk Pemberdayaan. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 1(1).
- Wolf, J., Nogueira, F., & Borges, M. (2021). A Collaborative Methodology for Local Strategic Planning: Insights from Four Plans in Portugal. *Planning Practice and Research*, 36(1), 91–107. <https://doi.org/10.1080/02697459.2020.1755138>
- Wu, J. J. (2008). Ecology, Planning, and Management of Urban Forests. *Ecology, Planning, and Management of Urban Forests, January 2008*. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-71425-7>
- Wulandari, S., Rifardi, R., Rasyad, A., & Yusmarini, Y. (2020). STATUS KEBERLANJUTAN RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI CADANGAN KARBON DI KOTA PEKANBARU (The Sustainability Status of Green Open Space as Carbon Stock in Pekanbaru City). *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 25(2), 73. <https://doi.org/10.22146/jml.23817>